

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)**



**KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin Tahun 2024, nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2024. Serta diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Kecamatan Paringin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin Tahun 2024 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Paringin, 08 Juli 2024

CAMAT PARINGIN



HUDI DARMAWAN, M.IP
NIP. 19860427 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024	10
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA	22
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perubahannya.....	22
B. Dampak Sosial Ekonomi	35
BAB IV PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 hanya ada 1 (satu) dan merupakan Indikator dari Tujuan SKPD. Yang menjadi penyebab dari tersebut adalah, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dilakukan sebelum Pohon Kinerja dan Cascading Kecamatan Terbaru selesai disusun. Namun pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan merupakan Sasaran SKPD.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) adalah Dokumen Perencanaan Perubahan yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif Sub Kegiatan. Mendukung terwujudnya Good Governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented Government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kecamatan Paringin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di Lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian Target-Target RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, khususnya Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2024. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang harus disesuaikan, serta untuk menyempurnakan perencanaan agar bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Kecamatan Paringin Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Paringin, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin dimulai dari usulan setiap Seksi atau PPTK dan juga dari Sekretariat, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Paringin untuk menentukan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Review Hasil Evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Paringin menetapkan Sasaran Kinerja

yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian terhadap suatu sasaran.

Pencapaian IKU Kecamatan Paringin sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Paringin sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	87	86,78	99,75%
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	100	50	50,00%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%

Adapun Formulasi Perhitungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas, adalah sebagai berikut.

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani Dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi Dikali 100%
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas, berikut Jumlah Pagu dan Realisasi Pagu sampai dengan Bulan Juni 2024 (Semester I), adalah sebagai berikut :

**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BESERTA
PAGU DAN REALISASINYA SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
01	Jumlah Laporan Masyarakat (LM) Dinyatakan dan Sempiternan Sesuai	PERYELBODARAAS PEMBERINTAHAR DAN PELAYANAN PUBLIK	402.102.070,00	182.446.100,00	43,17%
		Perpindagpasa Urusa Pamarataha yang Tidak Dikububaha oleh Hart Raja Pamarat Damar yang Ada di Kuarataha	402.102.070,00	182.446.100,00	
		Facilitas Percepatan Percepatan Bantaha Pamarat: Mimaral di Wilayah Kuarataha	152.812.540,00	62.928.100,00	
		Percepatan Efektifitas Pamarataha: Percepatan Laporan Masyarakat di Wilayah	249.489.530,00	89.528.000,00	
02	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.305.711.800,00	372.907.200,00	11,28%
		Kawubaha Kagatua Pemberdayaan Desa	326.699.200,00	65.280.000,00	
		Percepatan Partisipasi Masyarakat dalam Pamarat Mamarataha Percepatan	20.404.200,00	2.600.000,00	
		Selarasan Pamarataha Pamarataha dan Kagatua Pemberdayaan Masyarakat yang Dikububaha oleh Pamarataha dan Bantaha di Wilayah	27.470.000,00	2.600.000,00	
		Percepatan Efektifitas Kagatua Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	262.825.000,00	60.080.000,00	
		Kagatua Pemberdayaan Kelurahan	2.799.362.200,00	199.779.000,00	
		Percepatan Pamarataha dan Pamarataha	1.796.343.200,00	67.900.000,00	
		Pamarataha Masyarakat di Kelurahan	1.003.019.000,00	111.879.000,00	
		Pemberdayaan dan Kuarataha Kelurga Tingkat Kemubaha dan Kelurahan	179.660.400,00	77.779.200,00	
		Percepatan Kuarataha Kelurga dalam Percepatan Pamarataha dan Kuarataha untuk Mewakubaha Bantaha Desa Mamarataha	21.003.600,00	6.040.000,00	
		Percepatan dan Percepatan Kuarataha Kelurga dalam Kuarataha Pamarataha Kelurga Mamarataha Kelurga Berkubaha	147.796.800,00	70.000.000,00	
		03	Pamarataha Damarataha Kuarataha dan Kuarataha Damarataha yang Damarataha	PROGRAM KOORDINASI KETERTANAN DAN KETERTANAN UMUM	
Kawubaha Spora Percepatan Kuarataha	279.477.100,00			186.189.000,00	
Percepatan dengan Kuarataha Negara Republik Indaraha, Tercepat Mamarataha Indaraha dan Bantaha Bantaha di Wilayah	201.320.100,00			129.324.000,00	
Selarasan Tercepat dengan Tercepat Agara dan Tercepat Masyarakat	78.157.000,00			56.865.000,00	
04	Pamarataha Desa yang Tercepat Administrasi Pamarataha	PROGRAM PEMBERAAN DAN PERGAWASAH PEMBERINTAHAR DESA	113.289.400,00	13.212.000,00	11,67%
		Facilitas, Bantaha dan Kawubaha Pamarataha dan Pamarataha	113.289.400,00	13.212.000,00	
		Facilitas Percepatan Pamarataha Desa dan Pamarataha Kepala Desa	10.286.100,00	2.670.000,00	
		Facilitas Administrasi Tata Pamarataha Desa	22.003.000,00	8.640.000,00	
		Facilitas Pamarataha, Pamarataha, dan Percepatan Ruang Desa serta Percepatan dan Percepatan Bantaha Desa	81.000.300,00	1.202.000,00	

05	Pemerintah Desa yang Terdiri Administrasi Keuangan	PROGRAM PEMERINTAH DASAR	72.889.000,00	88.910.000,00	67,80%
		PENGAWAHLAN PEMERINTAH DESA			
		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemertintahan Desa	72.889.000,00	88.910.000,00	
		Fasilitas Perencanaan Organisasi Desa dan Pengembangan Aset Desa	27.034.600,00	5.300.000,00	
		Fasilitas Struktural Pemertintahan Pengembangan Dampak dengan Pengembangan Desa	11.030.000,00		
		Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pengembangan Partisipatif	30.825.000,00	27.164.000,00	

B. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);

12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Mewujudkan Sinergitas dan Singkronisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pengalokasian Anggaran secara Efektifitas dan Efisiensi sehingga menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur pada Kecamatan Paringin dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Sasaran dan Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk.
3. Memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin.
4. Mempermudah Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2024.
5. Memberikan pedoman dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian pada Lingkungan Kecamatan Paringin.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin Tahun 2024 ini adalah, sebagai Penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Paringin Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Paringin terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Capaian Kinerja Kecamatan Paringin Tahun 2024, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Paringin 2021-2026. Hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan Target Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Kecamatan Paringin pada Tahun 2024 melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya Sasaran Strategis.

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II, maka untuk Capaian Kinerjanya adalah 24,85%, sedangkan Realisasi Anggarannya adalah sebesar 40,76%. Uraian selengkapnya terkait Capaian Kinerja perindikator sampai dengan Bulan Juni 2024, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 25% atau sebanyak 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) dokumen. Hal ini dikarenakan Dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sudah selesai disusun, sedangkan untuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 masih dalam Tahap Penyusunan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.6.116.000,- atau sebesar 54,01%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.11.324.800,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau 1 (satu) dokumen yang disusun dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Dokumen Rancangan RKA-SKPD Tahun 2025 sudah dientri pada Aplikasi SIPD-RI. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.4.970.000,- atau sebesar 46,30%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.10.735.400,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 16% atau sebanyak 1 (satu) laporan, dari Target Kinerja sebanyak 6 (enam) laporan. Hal ini dikarenakan baru Laporan Pengukuran Kinerja (LKIP) Tahun 2023 yang disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.2.950.000,- atau sebesar 25%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.11.666.200,-.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 34 Orang/Bulan dari Target Kinerja sebanyak 34 Orang/Bulan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.2.851.030.705,- atau sebesar

53,77%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.302.413.744,-.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) paket dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) paket. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.88.000.000,- atau sebesar 54,39%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.161.788.500,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 25% atau sebanyak 3 (tiga) paket dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.16.202.000,- atau sebesar 68,74% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.23.569.700,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 25% atau sebanyak 3 (tiga) paket dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.164.500.000,- atau sebesar 33,12% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.496.651.300,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50 % atau sebanyak 6 (enam) paket dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah

sebesar Rp.15.424.800,- atau sebesar 60,46% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.25.511.800,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 41 % atau sebanyak 5 (lima) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.2.680.000,- atau sebesar 50,57% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.5.268.000,-.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (duabelas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.454.399.396,- atau sebesar 67,54% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.672.755.300,-.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 35% atau sebanyak 7 (tujuh) unit dari Target Kinerja sebanyak 20 (dua puluh) Unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.32.400.000,- atau sebesar 57,4% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.56.443.000,-.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (duabelas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran

adalah sebesar Rp.50.761.169,-atau sebesar 39.4% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.128.824.450,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (duabelas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.376.080.200,-atau sebesar 48.93% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.776.065.520,-.

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 28.57% atau sebanyak 10 (sepuluh) unit dari Target Kinerja sebanyak 35 (tigapuluhlima) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.56.089.300,-atau sebesar 34.4% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.163.036.120,-.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 66.67% atau sebanyak 2 (dua) unit dari Target Kinerja sebanyak 3 (tiga) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.34.800.000,-atau sebesar 48.52% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.71.281.840,-.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) laporan dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.92.926.100,- atau sebesar 60.89%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.152.618.540,-.
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 25% atau sebanyak 1 (satu) laporan dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.89.520.000,- atau sebesar 35.58%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.249.483.800,-.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 7 (tujuh) LK dari Target Kinerja sebanyak 14 (empatbelas) LK. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.3.690.000,- atau sebesar 13.98%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.26.404.200,-
- Sub Kegiatan Sinkronisasi Program KERja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah

sebesar Rp.2.860.000,-atau sebesar 7.63%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.37.470.000,-

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 2 (dua) laporan dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.88.830.000,-atau sebesar 33.8%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 262.825.000,-.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 16% atau sebanyak 2 (dua) unit dari Target Kinerja sebanyak 12 (duabelas) unit. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.87.950.000,-atau sebesar 4.89%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.1.796.945.500,-.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 18% atau sebanyak 2 (dua) pokmas dari Target Kinerja sebanyak 12 (duabelas) pokmas. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.111.829.000,- atau sebesar 11.16%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.1.002.416.700,-.

c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) Keluarga dari Target Kinerja sebanyak 16 (enambelas) Keluarga. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 6.840.000,- atau sebesar 21.47%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.853.600,-.

- Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) Keluarga dari Target Kinerja sebanyak 16 (enambelas) Keluarga. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp70.938.260,- atau sebesar 48%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.147.796.800,-.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 58.33% atau sebanyak 7 (tujuh) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (duabelas) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.126.524.500,- atau sebesar 62.23%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.203.320.100,-.

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) laporan dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.59.665.000,- atau sebesar 78.34%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.76.157.000,-.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.3.670.000,- atau sebesar 35,34%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.386.100,-.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.8.645.000,- atau sebesar 37,56%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 22.835.500,-.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.6.300.000,- atau sebesar 19,6%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.034.600,-.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.030.000,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp.27.165.000,-atau sebesar 88,7%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp.30.825.000,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau 0 (nol) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 16 (enambelas) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 1.200.000,-atau sebesar 1,5%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 80.047.800,-.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Tahun 2024 sebagai mana penjelasan di atas, dapat juga dilihat pada table berikutini :

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Perubahannya

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab II di atas, bahwa dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Paringin melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ada tambahan 1 (satu) Sub Kegiatan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Dengan Sub Kegiatannya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Penambahan 1 (satu) Sub Kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan Semangat Kerja Aparatur Kecamatan Paringin, sehingga target-target yang telah ditetapkan baik itu Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja dapat tercapai.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Tahun 2024, dapat dilihat pada table berikut ini :

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PARINGIN TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Alasan Perubahan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	74,00	4.421.066.301	71,10	5.358.223.569	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.726.000	100%	40.776.400	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.324.800	4 Dokumen	11.324.800	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.735.000	2 Dokumen	14.785.400	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	11.666.200	4 Laporan	14.696.200	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100%	5.302.413.744	100%	5.651.816.844	
04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Merintis Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	5.302.413.744	35 Orang	5.651.816.844	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100%	161.788.500	100%	213.834.500	
5	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	05	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pembelian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	161.788.500	40 Paket	213.834.500	untuk menyesuaikan Pakan Olahraga ASN

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.223.796.100	100%	1.682.434.500	
06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	23.569.700	12 Paket	30.844.300	
07	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	07	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	12 Paket	496.051.300	12 Paket	504.441.800	Untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kantor
08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	25.511.800	12 Paket	33.172.600	
09	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	09	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	5.368.000	12 Dokumen	6.936.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	672.755.300	12 Laporan	1.107.019.800	Untuk memenuhi kebutuhan Perjalanan Dinas Luar, Makanan, Minum dan ATK
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	56.443.000	100%	1.251.243.300	
11	Pengadaan Mebel	11	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	14 Unit	1.167.320.000	Untuk lebih meningkatkan mobilitas ASN Kecamatan dan
12	Pengadaan Mebel	12	Pengadaan Mebel	20 Unit	56.443.000	20 Unit	83.923.200	Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana mebel kantor
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	904.889.970	100%	957.494.070	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	128.834.450	12 Laporan	141.360.150	Untuk penambhain daya listrik
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	376.065.520	12 Laporan	615.933.920	Untuk memenuhi penyediaan bangunan THT,

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	234.317.960	100%	288.982.660	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Urusan	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	35 Unit	163.036.120	48 Unit	177.788.920	
15	Pemeliharaan/Kebahabiskan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	Pemeliharaan/Kebahabisan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	71.281.840	3 Unit	111.193.740	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	402.102.340	1 Laporan	408.245.840	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	402.102.340	100%	408.245.840	
16	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	17	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	152.618.540	1 Laporan	152.561.540	
17	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	349.483.800	4 Laporan	253.684.300	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Laporan	3.305.711.200	1 Laporan	3.768.046.400	
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	26.404.200	100%	26.404.200	
18	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 LK	26.404.200	14 LK	26.404.200	

19	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditandatangani oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	37.470.000	2 Dokumen	31.270.000
20	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	262.825.000	4 Laporan	242.750.000
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang	100%	3.799.361.600	100%	3.269.591.800
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbagikan	13 Unit	1.796.941.500	12 Unit	1.652.519.300
22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat/ Organisasi yang terbentuk	12 Pokmas	1.002.420.100	12 Pokmas	1.007.072.500
11	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang	100%	179.650.400	100%	198.030.400
23	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	16 Keluarga	31.853.600	16 Keluarga	31.853.600
24	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	16 Keluarga	147.796.800	16 Keluarga	160.170.800
IV	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IV PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DESUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP	1 Laporan	279.477.100	1 Laporan	298.977.100
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang	100%	279.477.100	100%	298.977.100

25	Sinergitas dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Sinergitas dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan	203.320.100	12 Laporan	218.320.100
26	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh	1 Laporan	76.157.000	1 Laporan	80.657.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	1 Laporan	185.959.000	1 Laporan	188.554.400
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya	16	185.959.000	16	188.554.400
27	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10.386.100	1 Dokumen	10.386.100
28	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata	1 Dokumen	22.835.500	1 Dokumen	49.085.500
29	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata	1 Dokumen	27.034.600	1 Dokumen	30.784.600
30	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	15.030.000	1 Dokumen	15.030.000
31	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	30.625.000	1 Dokumen	30.625.000
32	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa	16 Dokumen	80.047.800	16 Dokumen	52.643.200
Jumlah					12.090.585.314		14.750.385.914

Terkait adanya Penambahan Sub Kegiatan (sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas), maka untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.735.400,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.4.050.000,- untuk Penambahan Biaya Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.666.200,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.3.000.000,- untuk Penambahan Biaya Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.302.413.744,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 349.4403.100,-. Hal ini diakibatkan dengan adanya penyesuaian kenaikan TPP ASN.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.161.788.500,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.52.046.000,- untuk Belanja Pakaian Olahraga.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.569.700,-, ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.7.274.600,- untuk Penambahan Belanja Kabel Roll dan Lampu hias.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.496.651.300,-, ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.7.790.500,-adanya Penyesuaian volume pada Belanja Modal.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.25.511.800,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.7.660.800,-untuk Belanja Cetak Spanduk, SPP SPM.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.268.000,- ada Penambahan

Pagu Anggaran sebesar Rp.1.668.000,- untuk Volume Belanja Koran.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.672.755.300,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.434.264.500,- dengan tujuan untuk Peningkatan Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan Mobilitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

- Pengadaan Mebeuler.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.56.443.000,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.27.480.200,- untuk Penambahan Sarana Pendukung Kerja dan Rapat, seperti Rak Arsip dan Kursi Rapat.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.128.824.450,-, ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.12.735.300,-, untuk Belanja Penambahan Daya Listrik Kantor.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.766.065.520,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.39.868.400,- adanya Penyesuaian Volume/ Satuan Belanja THL Kantor.

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.163.036.120,-, ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.14.752.000,- untuk menambah Anggaran Belanja Suku Cadang.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.71.281.840,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.39.911.900,- untuk menambah Anggaran Belanja Partisi Kaca/ HPL.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.249.483.800,-, ada Penambahan Pagu

Anggaran sebesar Rp.6.200.500,- karena adanya Penambahan Belanja pada Kegiatan Keagamaan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.37.470.000,- ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.200.000,- akibat adanya Penyesuaian Volume Belanja Perjalanan Dinas.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.262.825.000,- ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp.20.075.000,- akibat adanya Penyesuaian Volume Belanja Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas

b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pagu Anggaran Murni untuk 2 (dua) Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.799.361.600,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.470.230.200,- akibat adanya Penambahan Belanja pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.147.796.800,-, ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.18.380.000,- untuk Penambahan Volume Belanja Perjalanan Dinas.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan KetertibanUmum.

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum.

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.203.320.100,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.15.000.000,- akibat adanya Penambahan Belanja Honorarium Linmas.

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.76.157.000,- ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.4.500.000,- untuk Belanja Perjalanan Dinas.

5. Program Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa.

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.22.386.500,-, ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.26.250.000,- untuk Penambahan Volume Belanja Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.27.034.600,-, ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.3.750.000,- untuk Penambahan Volume Belanja Perjalanan Dinas.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.80.047.800,-, ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp.27.404.600,- akibat adanya Penyesuaian Volume Belanja Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas.

B. Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Dengan dilaksanakannya seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di atas, diharapkan akan berdampak secara Sosial Ekonomi terhadap Masyarakat Kecamatan Paringin. Khususnya untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah, sebagaiberikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
4. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan.
5. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Adapun Dampak Sosial Ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan oleh Masyarakat Kecamatan Paringin terkait Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan yang mengampu ***Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat*** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial***, yaitu :
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ;Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Fasilitasi Pelayanan

Bantuan Sosial, Kegiatan Penunjang (Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan, Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten, Fasilitasi Safari Ramadhan).

Dengan terpenuhinya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Fasilitasi Pelayanan Bantuan Sosial, maka secara **SOSIAL**, masyarakat merasakan hak-haknya sebagai warga negara telah dipenuhi oleh Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **Jumlah Lembaga KemasyarakatanDesa (LKD) yang Aktif**, yaitu :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
 - 4) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Rapat Koordinasi Rembug Stunting Tingkat Kecamatan, Kegiatan TP. PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa/ Kelurahan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Dengan menurunnya Angka Prevalensi Stunting, maka hal tersebut akan berdampak secara **SOSIAL**.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh TP. PKK Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang berupa Pelatihan-Pelatihan Keterampilan akan berdampak secara **EKONOMI**.

Dengan semakin Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), diharapkan akan berdampak secara **SOSIAL** terhadap para Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dimaksud.

c. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani, yaitu :

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pembinaan Kerukunan Hidup antar SARA dan Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Seluruh kegiatan tersebut di atas bermuara pada 1 (satu) tujuan, yaitu Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Umum. Sehingga dengan terciptanya keadaan tersebut pada Wilayah Kecamatan Paringin, maka akan berdampak besar kepada masyarakat secara **SOSIAL DAN EKONOMI**.

d. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan** dan **Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan**, yaitu :

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
- 4) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- 5) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- 6) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desaserta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan, Peningkatan Kapasitas BPD, Fasilitasi Pembangunan Desa dan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dengan semakin Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa dan BPD dan selesainya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, diharapkan akan berdampak secara **SOSIAL** terhadap Pemerintahan Desa dan warganya.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paringin Tahun 2024, yang selanjutnya akan dibarengi dengan perubahan produk turunannya yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Maka diharapkan dampaknya akan dirasakan, yaitu dengan semakin meningkatnya Semangat Kerja seluruh Aparatur Kecamatan Paringin. Sehingga target-target yang telah ditetapkan, baik itu target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun pada Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.

Paringin, 08 Juli 2024

CAMAT PARINGIN



HUDI DARMAWAN, M.IP
NIP. 19860427 200412 1 001